

pada 11 puskesmas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 6 dari 11 puskesmas mengalami peningkatan ABJ $\geq 95\%$, seperti tampak pada lampiran 6. Ke-enam kepala puskesmas melakukan komunikasi dengan baik sejak sosialisasi program baru di DKK sampai pada pelaksanaan program PSN di lapangan. Mereka memiliki keinginan, kemauan, dan sikap yang sungguh-sungguh dalam menjalankan program PSN baru itu. Mereka memanfaatkan secara maksimal sumberdaya yang ada di puskesmas, dan membentuk tim PSN-DBD yang bertugas melakukan pendampingan pelaksanaan PSN plus larvasidasi massal oleh masyarakat. Lima kepala puskesmas yang lain tidak maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan PSN. Gambaran di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan terbaru yaitu PSN plus larvasidasi massal berhasil meningkatkan persentasi puskesmas yang ABJ-nya $\geq 95\%$. Angka ini merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan PSN-DBD.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Di Puskesmas yang berhasil dan Di Puskesmas yang kurang berhasil Dalam Upaya Pengendalian Demam Berdarah Dengue”.

B. Perumusan Masalah

Implementasi kebijakan PSN di puskesmas dalam upaya penanggulangan DBD di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Jepara belum berjalan baik. Hal ini terbukti dengan adanya : rendahnya persentasi puskesmas yang ABJ-nya melebihi SPM, kasus DBD masih selalu tinggi, paradigma *fogging* masih melekat pada masyarakat dalam